1. Nama Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan anak dan perempuan, perlindungan anak dan perempuan, serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
3. Fungsi :
    a. penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
    b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
    c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
    d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
    e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
    f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Badan;
    g. pemberian rekomendasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
    h. melaksanakan kesekretariatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
    i. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTB dan kelompok jabatan fungsional; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%)	Sekunder
2.	Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%)	Sekunder
3.	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)	Primer
4.	Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)	Primer
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Primer
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%)	Primer
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Primer
8.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Primer

9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Primer
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	Primer
11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Primer
12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Primer
13.	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)	Primer
14.	Persentase pemahaman tentang gender dan persoalannya (%)	Primer
15.	Persentase pengarustamaan gender yang telah dilakukan (%)	Primer
16.	Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor (%)	Primer
17.	Cakupan pemetaan data pilah sebagai data pembuka wawasan issue gender (siga)	Primer
18.	Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan (%)	Primer
19.	Persentase akses perempuan dalam pekerjaan (%)	Primer
20.	Cakupan pelaksanaan pengembangan	Primer

	kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan layak anak (%)	
21.	Cakupan pengarustamaan hak anak dan bidang perlindungan anak (%)	Primer
22.	Cakupan anak berhadapan hukum yang mendapat perlindungan/restoratif justice (%)	Primer
23.	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%)	Primer
24.	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)	Primer
25.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	Primer
26.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	Primer
27.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	Primer
28.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)	Primer
29.	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Jumlah PIK-KRR aktif (buah)	Primer
30.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	Primer
31.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan (%)	Primer

32.	Remaja yang menjadi anggota BKR (%)	Primer
33.	Lansia yang menjadi anggota BKL (%)	Primer